

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah yang mengacu pada sektor riil dengan skala prioritas bidang pertanian dan pertumbuhan UMKM dengan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai dan ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan efektif dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan Visi lima tahun mendatang yaitu :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Agar visi dapat diwujudkan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jateng perlu mengetahui hal-hal isu strategis yang perlu ditangani antara lain :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah, mengingat sampai dengan bulan Maret tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih diatas rata-rata nasional sebesar 10,64%, akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik (0,39% / tahun dalam periode 2013-2017) dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan nasional (0,26% / tahun dalam periode 2013-2017).

Apabila dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan, terdapat 15 kab dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata Provinsi dan Nasional yang didominasi masyarakat miskin di wilayah pedesaan

dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan petani, penciptaan nilai tambah hasil pertanian dengan hilirisasi / industrialisasi sektor pertanian dari on farm oriented menuju of farm oriented berbasis teknologi tepat guna dan potensi keunggulan lokal desa (local wisdom), mendorong terciptanya corporate farming dan mix farming, menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian dan pendampingan petani secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk pengangguran telah menunjukkan progres yang semakin baik, ditunjukkan dengan penurunan prosentase TPT dari 4,63% tahun 2016 menjadi 4,57% pada tahun 2017. Untuk itu agar program kegiatan juga terus dikembangkan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean governance, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorisme, hate speech, dan hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

2. Daya Saing Ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28% dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Industri yang tumbuh masih didominasi oleh industri padat karya dengan tingkat serapan buruh berpendidikan dan keterampilan rendah, serta mengolah bahan baku impor dan barang modal impor; investasi yang mendasarkan ketersediaan buruh dengan upah kerja yang murah masih mendominasi, investasi pada sektor jasa, pariwisata dan pengolahan atas sumber daya alam serta berteknologi tinggi masih rendah, sektor produksi masih didominasi pada skala UMKM dengan kondisi kurang efisien, lemah pada akses permodalan dan daya saing produk UMKM di pasar; kesenjangan wilayah dan antar kelompok yang masih belum baik.

3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

IPM Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 69,98 angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,18. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran perkapita (yang disesuaikan). Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang terbesar adalah lulusan SD. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA ancaman terbesar adalah penduduk usia produktif. Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat.

4. Kedaulatan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat.

Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan.

Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk rumah tangga miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah.

5. Kesenjangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum rata, yang ditunjukkan dengan Indeks Wiliason sebesar 0,6 di tahun 2016. Daerah Kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kurang maju dibanding wilayah Pantura dan Pusat Pemerintahan di Semarang dan pusat pertumbuhan Surakarta. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah – daerah tertinggal dengan pusat – pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berumpa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Isu pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ini sudah menjadi isu global dan Nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Terwujudnya profil birokrasi yang akuntabel, berintegritas, disiplin, inovatif, dan profesional dengan mengacu pada delapan area prioritas reformasi birokrasi menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dalam paper less, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean government, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, hate speech dan hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah utamanyaantisipasi pelaksanaan Pemilihan Presiden – Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019, terorisme dan maraknya radikalisme diperlukan proporsionalitas antara jumlah penduduk dengan aparat keamanan serta pelibatan peran serta masyarakat. Selanjutnya guna mewujudkan iklim demokrasi masih diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, maka kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan

dengan pembelanjaan keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover), serta pengungkit (leverage). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakn sebagai berikut.

Peningkatan kinerja pendapatn daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi:

1. Optimalisasi Pungutan PAD melalui;
 - a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain – lain yang sah;
 - b. Mengupayakan dan membangun sumber – sumber pendapatan baru;
 - c. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat / wajib pajak secara akuntabel;
 - e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online sistem menjadi lebih mudah dan murah.
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, Optimalisasi dan Pemberdayaan / Revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan dan daya saing daerah.

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2017, belanja daerah Provinsi Jawa Tengah rata – rata mengalami kenaikan sebesar 14,94% per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dikarenakan pelimpahan pegawai dari Pemerintah Kabupaten / Kota dan Nasional ke Provinsi berdasarkan amanat Undang – Uandang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Anggaran		Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
					Fisik	Keu	
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.349.000.000	2.117.910.758	100,00	90,16		
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00		
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	493.800.000	322.443.256	100,00	65,30	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
	3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	79.897.600	100,00	99,87		
	4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	157.500.000	157.493.900	100,00	100,00		
	5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.500.000	106.340.000	100,00	99,85		
	6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	46.000.000	45.999.400	100,00	100,00		
	7 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.250.000	40.271.250	100,00	97,63		
	8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.750.000	21.082.000	100,00	96,93		
	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	94.500.000	68.562.200	100,00	72,55	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
	10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah	300.000.000	289.289.272	100,00	96,43		
	11 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.002.700.000	981.531.880	100,00	97,89		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.455.100.000	1.336.620.471	100,00	91,86		
	1 Kegiatan Pengadaan/peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/aparatur Pemerintah	100.000.000	98.790.000	100,00	98,79		
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	542.600.000	528.414.000	100,00	97,39		
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	562.500.000	482.753.375	100,00	85,82	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
	4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	26.000.000	25.390.000	100,00	97,65		
	5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	189.000.000	176.423.096	100,00	93,35	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
	6 Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi	35.000.000	24.850.000	100,00	71,00	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	41.568.000	38.540.000	100,00	92,72		
	1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	41.568.000	38.540.000	100,00	92,72	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	715.094.000	706.740.950	100,00	98,83		
	1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.000.000	50.190.950	100,00	88,05	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	
	2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	122.422.000	121.985.000	100,00	99,64		
	3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	535.672.000	534.565.000	100,00	99,79		
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7.174.023.000	7.057.808.500	100,00	98,38		

No	Program/Anggaran		Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
					Fisik	Keu	
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas	1.100.000.000	1.072.000.000	100,00	97,45	
	2	Kegiatan Fgd Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	400.000.000	384.384.500	100,00	96,10	
	3	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	268.479.000	268.479.000	100,00	100,00	
	4	Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah	300.519.000	298.800.000	100,00	99,43	
	5	Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah Di Provinsi Jawa Tengah	190.000.000	180.143.000	100,00	94,81	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	6	Kegiatan Pembinaan Sosial Politik	340.000.000	338.025.000	100,00	99,42	
	7	Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah	300.000.000	298.194.000	100,00	99,40	
	8	Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerahkab/kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan	270.000.000	268.417.000	100,00	99,41	
	9	Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik	250.000.000	244.405.000	100,00	97,76	
	10	Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi	250.000.000	234.233.000	100,00	93,69	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	11	Peningkatan Demokratisasi dan Ham Bagi Kesejahteraan Rakyat	275.000.000	273.385.000	100,00	99,41	
	12	Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	220.225.000	217.600.000	100,00	98,81	
	13	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	530.000.000	518.489.000	100,00	97,83	
	14	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	325.000.000	325.000.000	100,00	100,00	
	15	Kegiatan Fgd Pengkajian Patologi Sosial	219.600.000	218.750.000	100,00	99,61	
	16	Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4Gn	650.000.000	649.239.000	100,00	99,88	
	17	Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013)	350.000.000	350.000.000	100,00	100,00	
	19	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	685.000.000	668.615.000	100,00	97,61	
	20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	250.200.000	249.650.000	100,00	99,78	
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		3.990.000.000	3.921.111.500	100,00	98,27	
	1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	200.000.000	199.031.000	100,00	99,52	
	2	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara	200.000.000	199.405.000	100,00	99,70	
	3	Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain	180.000.000	180.000.000	100,00	100,00	
	4	Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang	215.000.000	214.352.500	100,00	99,70	
	5	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah	300.000.000	294.268.000	100,00	98,09	
	6	Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan	1.000.000.000	997.091.000	100,00	99,71	
	7	Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya	270.000.000	268.967.000	100,00	99,62	
	8	Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	270.000.000	266.195.000	100,00	98,59	
	9	Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis yang Berdampak Politik	300.000.000	255.965.000	100,00	85,32	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	10	Kegiatan Pemasayarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Kalangan Ptn/pts dan Pendidik	150.000.000	145.615.000	100,00	97,08	
	11	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa	190.000.000	190.000.000	100,00	100,00	
	12	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan	185.000.000	182.733.000	100,00	98,77	

No	Program/Anggaran		Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
					Fisik	Keu	
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2		3	4	5	6	7
	13	Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Ppwk (Amanat Permendagri 72 /2012)	130.000.000	129.470.000	100,00	99,59	
	14	Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan	150.000.000	148.494.000	100,00	99,00	
	15	Kegiatan Fgd Penguatan Karakter Generasi Muda	250.000.000	249.525.000	100,00	99,81	
VII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1.575.000.000	1.496.848.300	100,00	95,04	
	1	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni & Budaya Daerah	300.000.000	265.310.000	100,00	88,44	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	2	Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur & Elemen Masyarakat	275.000.000	274.560.000	100,00	99,84	
	3	Pendayagunaan Potensi Ormas	450.000.000	449.685.000	100,00	99,93	
	4	Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara	250.000.000	248.975.000	100,00	99,59	
	5	Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan WASBANG & Ideologi Negara Bagi Aparatur & Elemen Masyarakat	300.000.000	258.318.300	100,00	86,11	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		1.975.000.000	1.974.600.000	100,00	99,98	
	1	Kegiatan Pemberdayaan Fkdm (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	
	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	225.000.000	224.600.000	100,00	99,82	
	3	Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	100,00	
IX	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat		5.269.100.000	4.927.039.550	100,00	93,51	
	1	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/Isn dan Toma/toga	350.000.000	328.825.000	100,00	93,95	
	2	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	700.000.000	587.186.500	100,00	83,88	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	3	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/pilkada	600.000.000	575.329.500	100,00	95,89	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	4	Kegiatan Fgd Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	800.000.000	693.042.500	100,00	86,63	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
	5	Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/pilkada	959.000.000	911.015.400	100,00	95,00	
	6	Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol Di Daerah	325.000.000	315.920.000	100,00	97,21	
	7	Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	550.000.000	546.755.000	100,00	99,41	
	8	Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	380.000.000	379.590.000	100,00	99,89	
	9	Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik	605.100.000	589.375.650	100,00	97,40	
	TOTAL ANGGARAN		24.543.885.000	23.577.220.029	100,00	96,06	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2017 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan

program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 34.682.087.910,-** atau **95,67 %** dari anggaran **Rp 36.251.559.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 43.747.577.649,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 17.097.376.000,-	Rp 16.433.017.881,-	96,11	Rp 20.253.668.232,-
Belanja Barang & Jasa	Rp 19.055.183.000,-	Rp 18.151.280.029,-	95,25	Rp 23.493.909.417,-
Jumlah	Rp 36.251.559.000,-	Rp 34.682.087.910,-	95,67	Rp 43.747.577.649,-

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 16.433.017.881,-** atau **96,13 %** dari anggaran **Rp 17.094.376.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 20.253.668.232,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 11.707.674.000,-	Rp 11.104.867.881,-	94,85	Rp 13.922.193.232,-
Belanja Pegawai langsung	Rp 5.389.702.000,-	Rp 5.328.150.000,-	98,91	Rp 6.331.475.000,-
Jumlah	Rp 17.094.376.000,-	Rp 16.433.017.881,-	96,13	Rp 20.253.668.232,-

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 18.151.280.029,-** atau **95,25 %** dari anggaran **Rp 19.055.183.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 23.493.909.417,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 1.634.244.000,-	Rp 1.632.519.550,-	98,89	Rp 1.856.201.600,-
Belanja Bahan/Material	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Jasa Kantor	Rp 3.542.150.000,-	Rp 3.366.141.256,-	95,03	Rp 3.570.944.980,-
Belanja Premi Asuransi	Rp 90.448.000,-	Rp 89.479.480,-	98,93	Rp 82.989.244,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 562.500.000,-	Rp 482.753.375,-	85,82	Rp 596.376.525,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 687.557.000,-	Rp 677.947.000,-	98,60	Rp 667.840.825,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp 4.185.975.000,-	Rp 4.084.603.000,-	97,58	Rp 2.123.090.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-	100,00	Rp 25.985.000,-
Belanja Sewa Alat Berat				
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 73.200.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 851.825.000,-	Rp 825.737.200,-	96,94	Rp 4.036.272.290,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 13.000.000,-
Belanja Pakaian Kerja	Rp 580.375.000,-	Rp 575.665.500,-	99,19	Rp 917.536.000,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp 41.568.000,-	Rp 38.540.000,-	92,72	Rp 0,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.075.941.000,-	Rp 5.618.882572,-	92,48	Rp 6.478.413.140,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 36.000.000,-	Rp 29.200.000,-	81,11	Rp 35.650.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp 595.600.000,-	Rp 558.811.096,-	93,82	Rp 2.734.558.813,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 44.100.000,-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat				
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat	Rp 165.000.000,-	Rp 165.000.000,-	100,00	Rp 192.000.000,-
Belanja Hadiah Uang	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 19.055.183.000,-	Rp 18.151.280.029,-	95,25	Rp 23.493.909.417,-

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 97.790.000,-** atau **98,78 %** dari anggaran **Rp 99.000.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 770.270.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 99.000.000,-	Rp 97.790.000,-	98,78	Rp 770.270.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	Rp 99.000.000,-	Rp 97.790.000,-	98,78	Rp 770.270.000,-

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 97.790.000,- atau 98,78 % dari anggaran Rp 99.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 704.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 99.000.000,-	Rp 97.790.000,-	98,78	Rp 704.270.000,-
Belanja Alat-alat Studio				
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	Rp 99.000.000,-	Rp 97.790.000,-	98,78	Rp 704.270.000,-

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Monumen	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 34.682.087.910,- sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp 44.517.847.649,-.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,-

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp 38.337.366,67 naik sebesar Rp 8.531.133,34 atau 28,62 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.806.233,33

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2016 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2016 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp 13.316.266,67 naik sebesar Rp 20.933,34 atau 0,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.295.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2017	2016
Asuransi BMD	Rp 13.316.266,67	Rp 13.295.333,33

Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	Rp 13.316.266,67	Rp 13.295.333,33

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 25.021.100,-** naik sebesar **Rp 8.510.200,-** atau **51,54 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 16.510.900,-** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2017	2016
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp 16.037.600,-	Rp 16.510.900,-
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	Rp 8.983.500,-	Rp 0,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	Rp 25.021.100,-	Rp 16.510.900,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp 28.327.835.384,- berkurang sebesar Rp 656.710.178,- atau 2,27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 28.984.545.562,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 28.984.545.562,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 97.790.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 360.188.500,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 457.978.500,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp 1.114.688.678,-
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1.114.688.678,-

Grand Total	Rp 28.327.835.384,-

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.786.143.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.786.143.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-
Jumlah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 11.786.143.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.682.341.109,- turun sebesar Rp 656.710.178,- atau 5,79 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.339.051.287,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	Rp 640.150.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 640.150.000,-
Alat Angkut	Rp 2.911.381.900,-	Rp 354.068.500,-	Rp 987.330.064,-	Rp 3.544.643.464,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp 85.700.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 85.700.000,-
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 5.134.204.209,-	Rp 103.910.000,-	Rp 127.,358.614,-	Rp 5.157.652.823,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.910.905.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 1.910.905.000,-
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Jumlah	Rp 10.682.341.109,-	Rp 457.978.500,-	Rp 1.114.688.678.000,-	Rp 11.339.051.287,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp 11.339.051.287,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 97.790.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 360.188.500,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 457.978.500,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp 1.114.688.678,-
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1.114.688.678,-
Grand Total	Rp 10.682.341.109,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.665.311.875,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.665.311.875,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	Rp 5.563.661.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.563.661.875,-
Monumen	Rp 101.650.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 101.650.000,-
Jumlah	Rp 5.665.311.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.665.311.875,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 5.665.311.875,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

Grand Total	Rp 5.665.311.875,-
-------------	--------------------

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 111.870.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 111.870.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-
Jaringan				
Jumlah	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp 111.870.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 111.870.000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 82.169.400,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 82.169.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 80.619.400,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp 1.550.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 1.550.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	Rp 82.169.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 82.169.400,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp 82.169.400,-
Penambahan	

Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 82.169.400,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.097.294.959,83 turun sebesar Rp 148.576.698,84 atau 1,45 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.245.871.658,67 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2017	2016
Alat Besar	Rp 240.056.250,00	Rp 160.037.500,00
Alat Angkut	Rp 1.988.577.025,00	Rp 2.734.203.464,00
Alat Bengkel	Rp 85.700.000,00	Rp 85.700.000,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.337.334.709,00	Rp 4.030.165.623,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.723.361.000,00	Rp 1.629.701.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung	Rp 1.650.764.642,50	Rp 1.539.491.405,00
Monumen	Rp 28.462.000,00	Rp 26.429.000,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp 43.039.333,33	Rp 40.143.666,67
Jaringan		
Jumlah	Rp 10.097.294.959,83	Rp 10.245.871.658,67

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.940.000,- turun sebesar Rp 7.940.000,- atau 50,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 15.880.000,-dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2017	2016
Aset Dikerjasamakan		
	2017	2016
Aset Tak Berwujud	Rp 39.700.000,-	Rp 39.700.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 31.760.000,-)	(Rp 23.820.000,-)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2017	2016
Barang Rusak Berat		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya	Rp 7.940.000,-	Rp 15.880.000,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp 39.700.00,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 39.700.000,-

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp 31.760.000,- naik sebesar Rp 7.940.000,- atau 33,33 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.820.000,-

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Barang Rusak Berat dan Penyusutan Barang Rusak Berat.

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.1.1.4. Utang Belanja

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.276.817.790,84 turun sebesar Rp 507.542.345,82 atau 2,70 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 18.784.360.136,66

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 35.490.226.193,32 turun sebesar Rp 9.176.170.751,18 atau 20,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 44.666.396.944,51

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp 35.490.226.193,32 turun sebesar Rp 9.176.170.751,18 atau 20,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 44.666.396.944,51

Beban	2017	2016
Beban Pegawai	Rp 16.433.017.881,00,-	Rp 20.253.668.232,00,-
Beban Barang & Jasa	Rp 18.142.748.895,66,-	Rp 23.493.223.100,33,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 914.459.416,66,-	Rp 919.505.612,17,-
Beban Lainnya		
Jumlah	Rp 35.490.226.193,32	Rp 44.666.396.944,51

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 16.433.017.881,- turun sebesar Rp 3.820.650.351,- atau 18,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 20.253.668.232,-

Beban	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp 11.104.867.881,-	Rp 13.922.193.232,-
Beban Pegawai Langsung	Rp 5.328.150.000,-	Rp 6.331.475.000,-
Jumlah	Rp 16.433.017.881,-	Rp 20.253.668.232,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.142.748.895,66 turun sebesar Rp 5.350.474.204,67 atau 22,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.493.223.100,34,-

Beban	2017	2016
Beban Persediaan	Rp 3.741.899.050,00,-	Rp 7.535.917.915,00,-
Beban Jasa	Rp 7.546.202.802,66,-	Rp 5.920.306.707,34,-
Beban Pemeliharaan	Rp 1.041.564.471,00,-	Rp 3.330.935.338,00,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp 5.618.882.572,00,-	Rp 6.478.413.140,00,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp 194.200.000,00,-	Rp 227.650.000,00,-
Jumlah	Rp 18.142.748.895,66	Rp 23.493.223.100,34,-

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp 914.459.416,66 naik sebesar Rp 5.046.195,51,- atau 0,55 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 919.505.612,17

Beban	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 906.519.416,66,-	Rp 911.665.612,17,-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp 7.940.000,00,-	Rp 7.940.000,00,-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	Rp 919.505.612,17,-	Rp 919.505.612,17,-

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017	2016
Ekuitas Awal	Rp 18.784.360.136,66	Rp 18.939.069.432,17
Surplus/Defisit-LO	(Rp 35.490.226.193,32)	(Rp 44.666.396.944,51)
RK-PPKD	Rp 34.682.087.910,00	Rp 44.517.847.649,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 300.595.937,50	(Rp 6.160.000,00)
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(Rp 754.500.178,00)	(Rp 6.160.000,00)
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		(Rp 6.160.000,00)
2. Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	Rp 360.188.500,00	
3. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(Rp 1.114.688.678,00)	
4. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	Rp 1.055.096.115,50	
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(Rp 46.706.562,50)	
2. Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp 1.101.806.678,00	
Ekuitas Akhir	Rp 18.276.817.790,84	Rp 18.784.360.136,66

BAB 6
PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

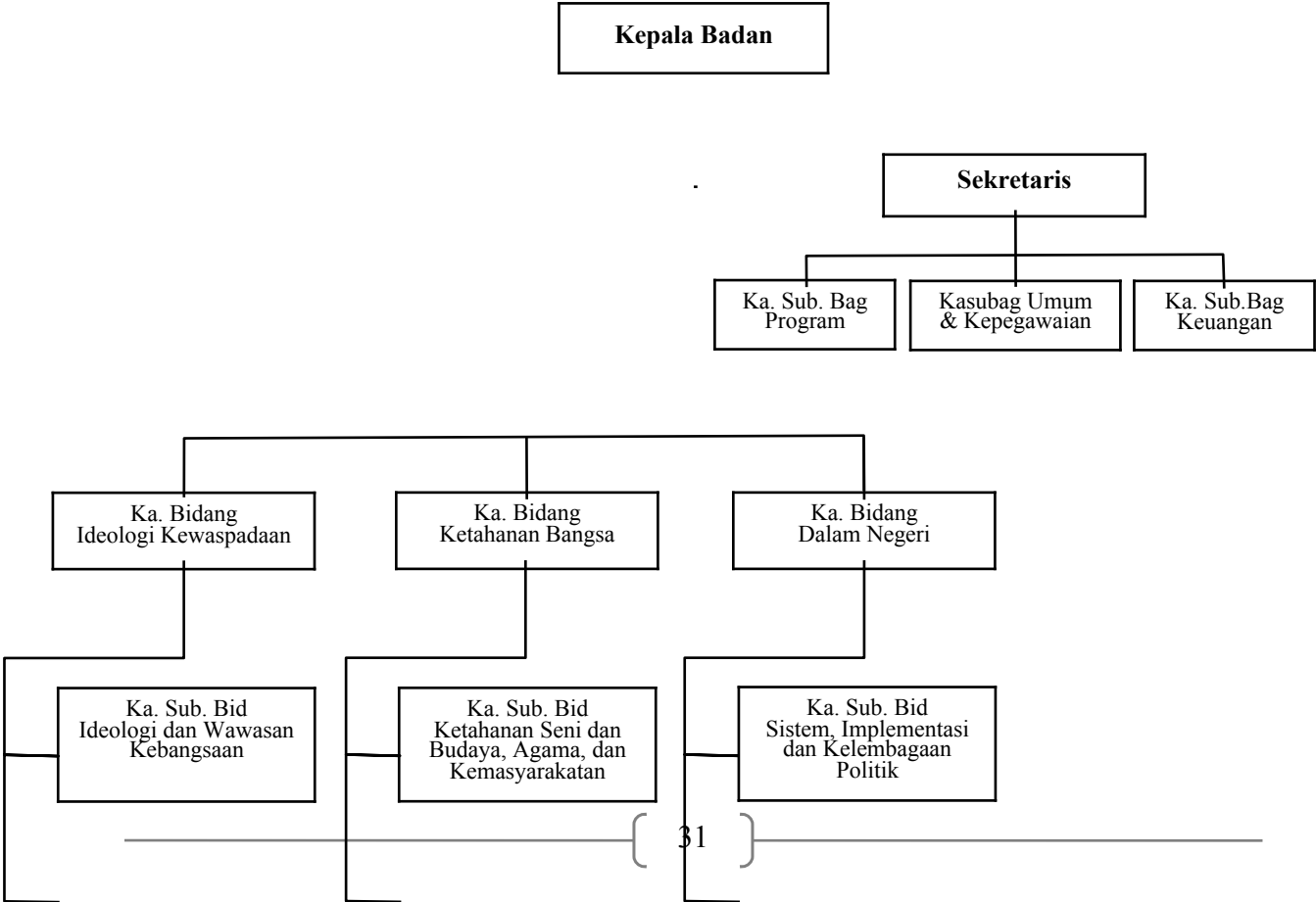
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 - 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Ka. Sub. Bid
Kewaspadaan
Nasional

Ka. Sub. Bid
Ketahanan Ekonomi

Ka. Sub. Bid
Pemilu, Pendidikan
dan Budaya Politik

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

- 2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

- 3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

- 4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 73 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 11 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 30 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma 3, 26 orang berpendidikan SLTA, 3 orang berpendidikan SLTP, dan 1 orang pegawai berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strate 2	11
Strata 1	30
Diploma 3	2
SLTA	26
SLTP	3
SD	1
Total	98

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 73 orang PNS, terdiri dari Golongan II 10 orang; Golongan III 50 orang; Golongan IV 13 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	1	III/a	3	IV/a	8
II/b	4	III/b	20	IV/b	4
II/c	4	III/c	6	IV/c	0
II/d	1	III/d	21	IV/d	1
	10		50		13

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Golongan

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	9
-	14

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

6.5. Laporan Pendataan Inventarisasi BMD yang Mengalami Pengalihan

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa urusan Perlindungan Masyarakat telah beralih ke Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya pengalihan Barang Milik Daerah dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah beralih ke Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Berikut Laporan Pendataan Inventarisasi BMD yang Mengalami Pengalihan baik ke Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang mengalami mutasi keluar dan mutasi masuk :

I. Ringkasan Laporan Barang

1. Tanah

a. Tanah (01.01)

Saldo Tanah pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 2 bidang tanah seluas 3314 m² senilai Rp.11,786,143,000,-
Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 2 bidang tanah seluas 3314 m² senilai Rp. 11,786,143,000,-. hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

2. Peralatan dan Mesin

a. Alat besar (02.02)

Saldo Alat Besar pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 1 unit senilai Rp.640.150.000,-
Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 1 unit senilai Rp.640.150.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

b. Alat Angkut (02.03)

Saldo Alat Angkut pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 28 unit senilai Rp.2.911.381.900,-
Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 46 unit senilai Rp.3.544.643.464,- Per tanggal 2 Januari 2017 berkurang sejumlah 3 unit senilai Rp.471.700.000,- ke Satpol PP, sehingga aset Kesbangpol menjadi sejumlah 43 unit senilai Rp.3.072.943.464,- yang menjadi saldo awal per 3 Januari 2017 pasca Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinai Jawa Tengah,
Pada tahun 2017 mutasi tambah karena hibah sejumlah 1 unit senilai Rp.354.068.500,- berasal dari BPKAD sedangkan mutasi kurang sejumlah 9 unit senilai Rp.150.736.000,- ke BPBD, sedangkan mutasi kurang sejumlah 7 unit senilai Rp.364.894.064,- ke BPKAD.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	354.068.500,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	515.630.064,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Dari jumlah di atas tidak terjadi/ dalam proses ruislag/sengketa adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.
Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Alat Bengkel (02.04)

Saldo Alat Bengkel pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 17 unit senilai Rp.85.700.000,-
Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 17 unit senilai Rp.85.700.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

d. Alat Pertanian (02.05)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai alat Pertanian.

e. **Alat Kantor dan Rumah Tangga (02.06)**

Saldo Alat kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 1.865 unit senilai Rp.5.134.204.209,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 1.936 unit senilai Rp.5.157.652.823,- Per tanggal 2 Januari 2017 berkurang sejumlah 69 unit senilai Rp.121.635.544,- ke Satpol PP, sehingga aset Kesbangpol menjadi sejumlah 1.867 unit senilai Rp.5.036.017.279,- yang dijadikan saldo awal per 3 Januari 2017 pasca Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Pada tahun 2017 mutasi kurang, sejumlah 15 buah senilai Rp.5.723.070,- kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan mutasi tambah sejumlah 12 buah senilai Rp.97.790.000,- hasil dari Belanja Modal, dan sejumlah 1 unit senilai Rp.6.120.000,- mutasi masuk dari BKD Provinsi Jawa Tengah.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	97.790.000,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	6.120.000,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	5.723.070,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Koreksi/Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

f. **Alat Studio dan Komunikasi (02.07)**

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 178 unit senilai Rp.1.910.905.000,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 178 unit senilai Rp.1.910.905.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

g. **Alat Kedokteran (02.08)**

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Kedokteran.

h. Alat Laboratorium (02.09)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Laboratorium .

i. Alat Keamanan (02.10)

Saldo Alat Keamanan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Keamanan.

3. Gedung dan bangunan

a. Bangunan Gedung(03.11)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 5 unit senilai Rp.5.563.661.875,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 5 unit senilai Rp.5.563.661.875,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

b. Bangunan Monumen (03.12)

Saldo Bangunan Monumen pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 2 unit senilai Rp.101.650.000,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 2 unit senilai Rp.101.650.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

4. Jalan, Jembatan dan Irigasi

a. Jalan dan Jembatan (04.13)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Jalan dan jembatan.

b. Bangunan Air Irigasi (04.14)

Saldo Bangunan Air Irigasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Bangunan air irigasi.

c. Instalasi (04.15)

Saldo Instalasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 2 unit senilai Rp.111.870.000,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 2 unit senilai Rp.111.870.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

d. Jaringan (04.16)

Saldo Jaringan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Jaringan.

5. Lainnya

a. Buku dan Perpustakaan (05.17)

Saldo Instalasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 1.061 unit senilai Rp.80.619.400,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 1.061 unit senilai Rp.80.619.400,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

b. Barang Bercorak Kebudayaan (05.18)

Saldo Instalasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 4 unit senilai Rp.1.550.000,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 4 unit senilai Rp.1.550.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

a. Bangunan Gedung (06.11)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Bangunan Gedung.

b. Bangunan Monumen (06.12)

Saldo Bangunan Monumen pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Bangunan Monumen.

7. ASET TAK BERWUJUD (ATB)

a. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 1 unit senilai Rp.39.700.000,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 1 unit senilai Rp.39.700.000,- hingga per 31 Desember 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

Demikian kami sampaikan Catatan Ringkas Barang atas Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2017. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka

penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19591202 198203 1 005

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam bentuk CD.